

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA	Nomor SOP	:	4058/UN15.10/KP/2024
	Tanggal pembuatan	:	20 Mei 2024
	Tanggal revisi	:	
	Tanggal efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	Kepala Biro Umum dan Keuangan,  Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si. NIP. 196709191994032002
BIRO UMUM DAN KEUANGAN			
BAGIAN KEUANGAN	Judul SOP	:	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Kedalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi	1. Memahami Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	1. Komputer/Laptop dan Printer 2. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran di unit tidak berjalan dengan baik	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

PROSEDUR KERJA DAN DIAGRAM ALUR

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
	Staf Akuntansi dan Pelaporan	Sub. Koordinator	Unit Pengguna Anggaran	Koordinator, Karo dan WR II	Kelengkapan	Waktu	Output
Merekap Data realisasi Pendapatan dan Belanja Unit					Dokumen LRA Simkeu dan Rekap Pendapatan	60 Menit	Rekapan Realisasi Pendapaan dan Belanja Unit
Melakukan analisa data capaian realisasi dengan rencana realisasi Pendapatan dan Belanja					Rekapan Realisasi Pendapaan dan Belanja Unit	60 Menit	Hasil Analisa realisasi dan rencana target
Membuat jadwal monitoring dan evaluasi ke semua unit					Hasil Analisa realisasi dan rencana target	30 Menit	Jadwal Monev
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan penggunaan anggaran					Dokumen LRA Simkeu, Anggaran Terpadu Unit dan Rekap Pendapatan	5 Hari	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev
Membuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran unit					Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev	2 Hari	Laporan Monev
Menyampaikan hasil monev Ke atasan					Laporan Monev	30 Menit	Laporan Monev
Menyimpan hasil monev sebagai arsip					Laporan Monev	10 Menit	Laporan Monev